

# LIMA REKOMENDASI IRM IMPLEMENTASI OGP DI INDONESIA

Secara keseluruhan, proses penyusunan rencana aksi kelima OGP Indonesia mengalami peningkatan dalam hal keterlibatan pihak pemerintah serta peluang bagi masyarakat sipil untuk menajamkan agenda rencana aksi. Menimbang berbagai peralihan kepemimpinan di sejumlah posisi-posisi strategis yang terkait dengan proses OGP, pemerintah perlu mengembangkan strategi pengelolaan pengetahuan yang baik untuk menghindari hambatan serupa di masa depan.

## MENGUATKAN FORUM MULTIPIHAK MELALUI PENERBITAN KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG KOMPREHENSIF

Penting bagi Bappenas untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat sipil serta kementerian/lembaga terkait lainnya dalam merancang forum multipihak yang inklusif. Saat ini hanya satu unsur sipil yang diberi mandat kepemimpinan di dalam forum. Ke depannya, perlu ada komposisi berimbang antara perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil di dalam forum.



## MENETAPKAN MEKANISME KOORDINASI ANTARLEMBAGA PEMERINTAH YANG JELAS DALAM PROSES PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN RENCANA AKSI

- Kembangkan repositori daring yang mencakup seluruh dokumen dan informasi proses OGP di Indonesia mulai dari rencana aksi pertama
- Kembangkan strategi pelibatan pihak-pihak baru yang belum pernah turut serta dalam proses OGP bersama masyarakat sipil
- Kembangkan mekanisme pertemuan rutin berkala antara Sekretariat Nasional OGI dan seluruh pihak perwakilan kementerian/lembaga pemerintah, misalnya setiap tiga bulan sekali.



## MENUNJANG PARTISIPASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL DAERAH

Pemusatan proses penyusunan rencana aksi di DKI Jakarta dapat dipahami sebagai upaya mengefisienkan anggaran dan waktu, namun Sekretariat Nasional OGI dapat mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan memfasilitasi partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil di luar Jakarta secara jarak jauh, setidaknya dengan mengoptimalkan kesempatan memberikan masukan melalui proses konsultasi daring.



## MENYERTAKAN KOMITMEN YANG MERESPONS PENYEMPITAN RUANG SIPIL SERTA DISINFORMASI PUBLIK DALAM RENCANA AKSI BERIKUTNYA



Rencana aksi OGP dapat berperan besar dalam mendudukkan pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama membangun komitmen yang relevan agar masyarakat bisa menikmati kebebasan berekspresi tanpa adanya risiko prosekusi.

## MENDORONG PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA DI SELURUH SEKTOR KEBIJAKAN

Rencana aksi OGP dapat menjadi medium strategis bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk terus berkolaborasi dalam mempercepat penerapan prinsip-prinsip satu data di seluruh sektor kebijakan.



Sekretariat CSO – Open Government Partnership Indonesia :

